

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)**

TAHUN 2019



**DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Dr. Soetomo No. 101 Bangil
Telp. (0343) 749075 – 749085
PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'Allah atas Taufiq dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 telah dapat terselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD tahun 2019 ini merupakan laporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada Bupati selain itu juga sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk memperbaiki dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Pasuruan, 24 Februari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KAB. PASURUAN



drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

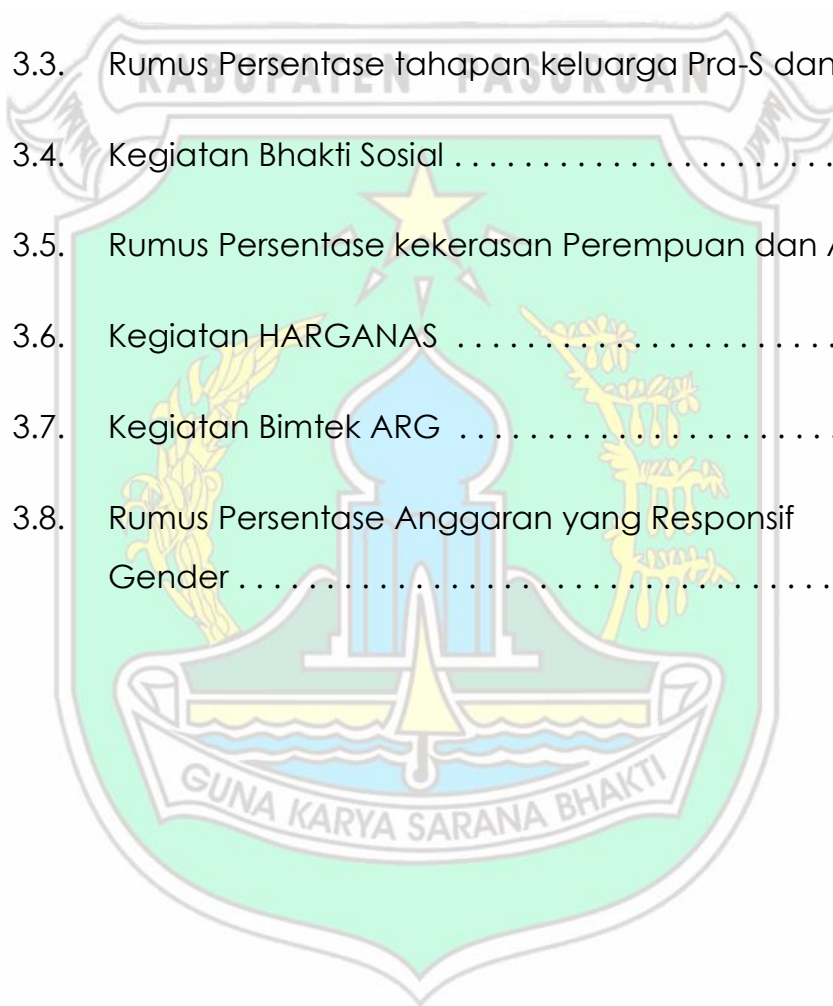
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum	4
D. Isu-isu Strategis	6
E. Landasan Hukum	6
F. Sistematika Penyusunan	9
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
A.1. Visi	12
A.2. Misi	12
A.3. Tujuan	12
A.4. Sasaran	12
A.5. Indikator Kinerja	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	31
C. Capaian Nilai SAKIP	33
IV. PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Permasalahan Terkait Capaian Kinerja	35
C. Strategi Pemecahan Masalah dan RTL	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi	5
3.1. Rumus Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif	20
3.2. Kegiatan Pelayanan MOW	21
3.3. Rumus Persentase tahapan keluarga Pra-S dan KS-I	23
3.4. Kegiatan Bhakti Sosial	24
3.5. Rumus Persentase kekerasan Perempuan dan Anak	26
3.6. Kegiatan HARGANAS	27
3.7. Kegiatan Bimtek ARG	29
3.8. Rumus Persentase Anggaran yang Responsif Gender	30



DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel	1.1. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel	3.1. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja	16
Tabel	3.2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2019	17
Tabel	3.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019	19
Tabel	3.4. Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif .	20
Tabel	3.5. Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif	22
Tabel	3.6. Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1	23
Tabel	3.7. Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1	25
Tabel	3.8. Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	26
Tabel	3.9. Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	28
Tabel	3.10. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	30
Tabel	3.11. Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Anggaran yang Responsif Gender	30
Tabel	3.12. Realisasi Anggaran Dinas KB-PP Tahun 2019	31
Tabel	3.13. Rincian Realisasi Anggaran Dinas KB-PP Tahun 2019 . .	32

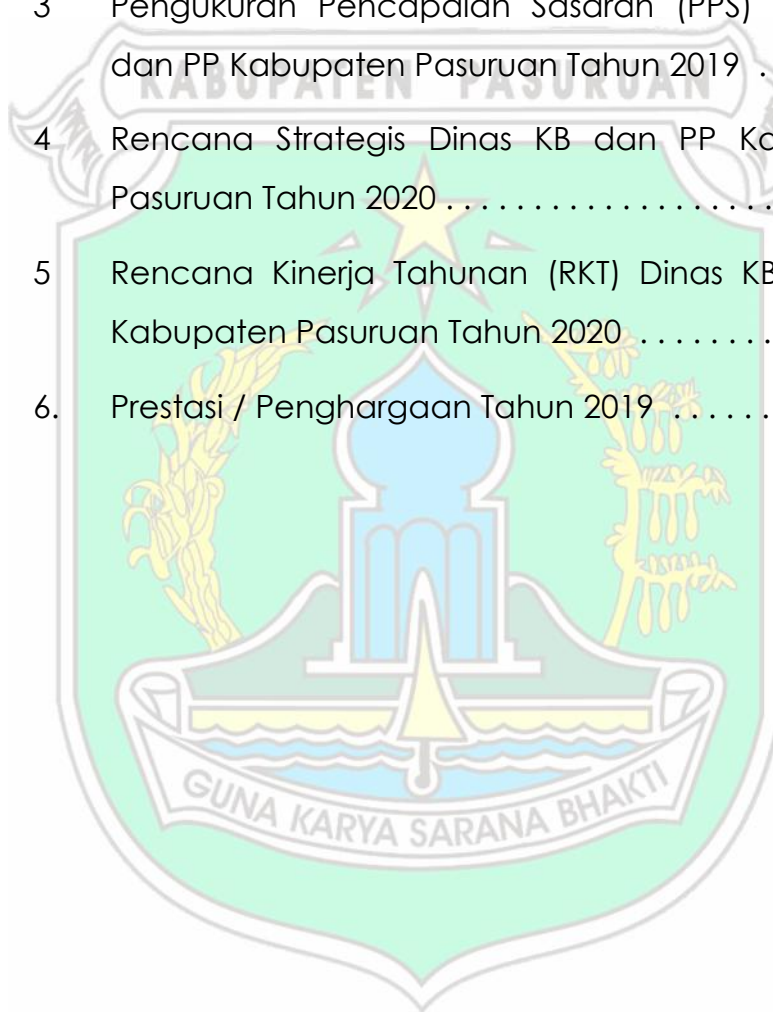
DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Capaian persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif	20
3.2. Capaian persentase tahapan keluarga Pra-S dan KS-I .	23
3.3. Capaian persentase kekerasan perempuan dan anak	27



DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Lampiran	1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2019	38
Lampiran	2 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2019	41
Lampiran	3 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2019	52
Lampiran	4 Rencana Strategis Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	53
Lampiran	5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2020	55
Lampiran	6 Prestasi / Penghargaan Tahun 2019	56



IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2017 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Mekanisme Pengukuran

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) tujuan, dan 3 (tiga) sasaran strategis, ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA);
2. Persentase tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I;
3. Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak;
4. Persentase Anggaran yang Responsif Gender.

C. Ringkasan Kinerja

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 menetapkan beberapa program untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya, yaitu :

I. Sekretariat :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

II. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk :

- Keluarga Berencana;
- Pelayanan Kontrasepsi;
- Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;

III. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan :

- Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB;
- Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
- Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
- Pengembangan Model Tri-Bina (BKB, BKR, BKL);
- Keluarga Sejahtera;
- Pembinaan Lingkungan Sosial;

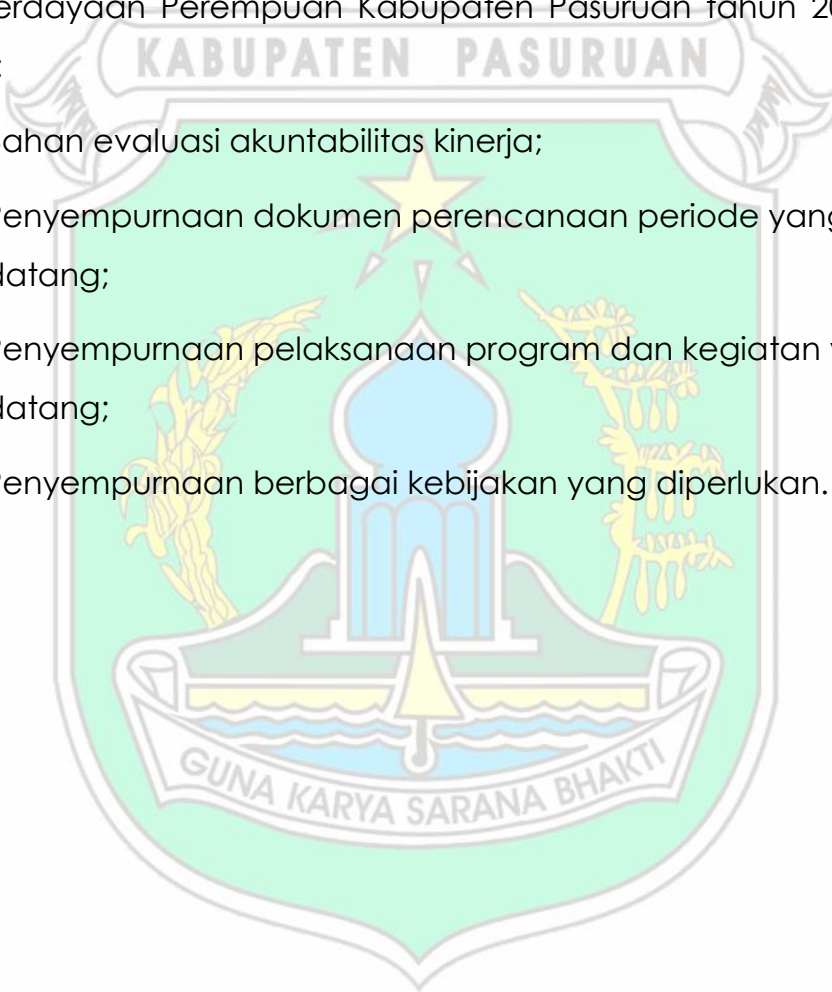
IV. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

- Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

Manfaat Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 adalah untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dimasa sekarang ini di Daerah dituntut untuk melaksanakan perubahan yang bermanfaat dan baik juga berinovatif, responsif sejalan dengan semakin berkembang dan meningkatnya tingkat kesadaran dan pola pikir masyarakat ditempatkan pada posisi yang pokok dalam mengukur keberhasilan suatu Pemerintahan atau Birokrasi Publik.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini dimana manajemen Pemerintah tidak lagi berorientasi kepada aspek Pemerintahan, namun telah bergeser kepada aspek tata pemerintah yang baik dan beramanah.

Sejalan dengan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang uraiannya tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Laporan kinerja merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan Pengukuran Kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi periode berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2019, merupakan inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun Anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin kesungguhan bagi setiap instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya serta sekaligus memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan seluruh program kegiatan, maka Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan diwajibkan secara periodik menyusun laporan kinerja.

A. Latar Belakang

Menguatnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai imbas berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendorong dan memotivasi masyarakat daerah menuntut pemerintah daerahnya masing-masing untuk memberikan pelayanan dengan mutu prima namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dan buruknya persepsi masyarakat mengenai kinerja birokrasi pemerintah. Kenyataan ini memacu negative behaviour public yang terekam melalui aktivitas penurunan tingkat disiplin masyarakat atas pelaksanaan regulasi, peningkatan kriminalitas, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat.

Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih & bertanggung-jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melaporkan hasil kinerja.

Di dalam Strategi Pembangunan Nasional (Dimensi Pembangunan), Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari *good governance*. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui terciptanya keluarga kecil yang sehat, sejahtera, terkendalnya tingkat kepadatan penduduk dan meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan anak.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan sampai dengan hasil yang dicapai dan harapannya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) selanjutnya.

C. Gambaran Umum

Luas wilayah Kabupaten Pasuruan $\pm$ 1.474,015 Km². Hasil Pendataan Keluarga Bulan Desember tahun 2019 terdapat jumlah penduduk sebanyak 1.834.529 jiwa dan jumlah keluarga 497.809 KK. Berarti rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga terdapat antara 3-4 jiwa. Sasaran pasangan usia subur terdapat sebanyak 363.982 kk dengan peserta KB aktif 273.503 orang atau prevalensi 75,14 %.

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di era otonomi ini sudah masuk perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimana Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan memiliki personil sebanyak 153 orang terdiri dari PNS Kabupaten sebanyak 27 orang, PTT (kontrak) sebanyak 2 orang dan THL sejumlah 44 orang. Dari 153 pegawai diatas Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PNS sebanyak 76 orang dan PLKB sebanyak 1 orang, PKB/PLKB CPNS sejumlah 3 orang. Sedangkan 73 orang berada di Dinas KB dan PP. adapun klasifikasi pegawai berdasarkan kepangkatan dan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan kepangkatan :
 - Golongan IV sebanyak 33 orang
 - Golongan III sebanyak 70 orang
 - Golongan II sebanyak 4 orang
 - Golongan I sebanyak - orang
 - P T T sebanyak 2 orang
 - T H L sebanyak 44 orang

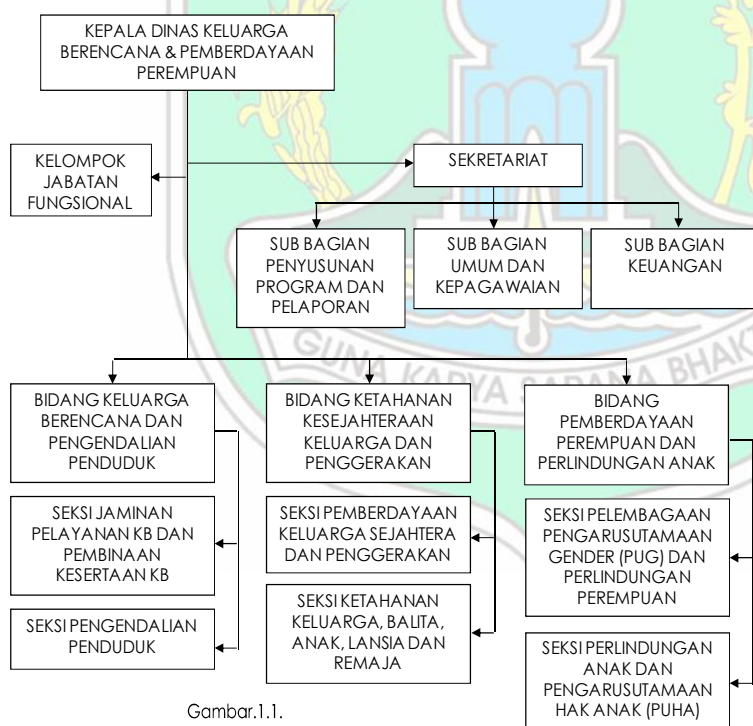
2. Menurut tingkat pendidikan seperti disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Status / ban yakni Pegawai				Jumlah (orang)
		PNS	CPNS	PTT	THL	
1.	Doktor (S3)	-	-	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	12	-	-	-	12
3.	Sarjana	53	3	-	14	70
4.	Sarjana Muda (D3/D1)	6	-	-	7	13
5.	SLTA	32	-	2	21	55
6.	SLTP	1	-	-	1	1
7.	SD	-	-	-	2	2
	Jumlah	104	3	2	44	153

Sumber : Dinas KB-PP

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati



Gambar.1.1.
Struktur Organisasi Dinas KB dan PP Kab. Pasuruan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi. Berikut ini bagan struktur organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan:

D. Permasalahan Utama Organisasi (Isu Strategis)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Adapun Isu – Isu Strategis yang sudah diidentifikasi oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Laju Pertumbuhan struktur Penduduk 1,01 % diatas Provinsi Jatim 0,73%;
2. Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Masih belum merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB;
3. Belum optimalnya penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
4. Minimnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
5. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih belum optimal;
6. Masih rendahnya kondisi kualitas pemberdayaan perempuan jika dibandingkan laki – laki (*Gender Equility*);
7. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Perlindungan anak masih belum optimal.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 No. 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

F. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dilakukan dengan membentuk *Focus Group Discussion* (FGD), yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 - 2023 menjadi beberapa sasaran lengkap dengan indikator kinerjanya. Kegiatan tahun 2019 yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
2. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan LKjIP Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan LKjIP.
3. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara singkat unsur-unsur Rencana Strategik Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.
4. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019, termasuk menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil serta akuntabilitas keuangan.
5. **Bab IV – Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan utama yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
6. **Lampiran-lampiran**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perencanaan strategik Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategik tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang secara sistematis dan berkelanjutan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang memuat visi, misi tujuan dan kebijakan organisasi dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif.

Dalam perencanaan strategik termuat pula tentang strategik pengembangan sumberdaya manusia / aparatur, jaringan kerja dan lingkungan kerja yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada kondisi, potensi permasalahan, kebutuhan nyata serta aspirasi masyarakat.

Berikut ini Visi, Misi dan Tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1. **Visi**

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing” (sesuai dengan Visi Bupati Pasuruan). Visi ini menjadi cita-cita dan harapan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan memberikan wawasan kepada masyarakat melalui beberapa program untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas serta adanya kesetaraan keadilan gender.

2. **Misi**

“Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan” (sesuai dengan Misi ke-5 Bupati Pasuruan)

3. **Tujuan**

Sesuai dengan Sasaran Bupati Pasuruan yaitu :
“Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat” yang selanjutnya menjadi tujuan dari Dinas KB dan PP dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target 90,76

4. **Sasaran**

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesertaan ber-KB;
- b. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan berkualitas;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Indikator Kinerja Sasaran

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara lain :

- a. **Sasaran pertama** (Meningkatnya Kesertaan ber-KB) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :
 - Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA) dengan target 73 %
- b. **Sasaran kedua** (Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan berkualitas) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :
 - Persentase tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I dengan target 40,25 %
- c. **Sasaran ketiga** (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut:
 - Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak dengan target 0,0065 %
 - Persentase Anggaran yang Responsif Gender dengan target 19,98 %

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perencanaan Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasar kebijakan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dan merupakan dokumen perencanaan operasional.

Di dalam Perjanjian Kinerja berisi kegiatan-kegiatan operasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Pasuruan dan sebagai rujukan dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

Perjanjian Kinerja mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai :

- Operasionalisasi Visi dan Misi Dinas KB dan PP Kab. Pasuruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan ke dalam rencana kegiatan yang bersifat lebih operasional;
- Rincian kegiatan melalui pendanaan/sumber pembiayaan APBD Kabupaten;
- Alat bantu dalam penyusunan LkjiP.

Indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas dijabarkan seperti pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi.

Maksud dan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan, adalah :

- Menjamin konsistensi perencanaan dan penetapan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah;
- Menjamin komitmen terhadap kesepakatan kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dalam MUSRENBANG maupun antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Memperkuat landasan penentuan kegiatan tahunan Dinas KB dan PP secara kronologis dan berkelanjutan.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2019 disajikan pada *Lampiran 1*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, elastis, nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Nepotisme, Kolusi dan Korupsi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan pemberdayaan dan perlindungan anak, perlu ditetapkan sasaran dan indikator dengan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Time-based* (SMART) untuk menetapkan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

► Tujuan

Sesuai dengan Sasaran Bupati Pasuruan dalam RPJMD yaitu :
“Meningkatkan Kesenjangan Masyarakat” yang selanjutnya menjadi tujuan dari Dinas KB dan PP.

- Indikator kinerja tujuan Dinas KB dan PP adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target pada tahun 2019 sebesar **90,76 %**.

► **Sasaran dan Indikator Kinerja**

a. Sasaran Meningkatnya Kesertaan ber-KB :

- Target indikator kinerja Persentase Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif tahun 2019 sebesar **73,00 %**.

b. Sasaran Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan berkualitas :

- Target indikator kinerja Persentase tahapan keluarga Pra-S dan KS-1 tahun 2019 sebesar **40,25 %**.

c. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Target indikator kinerja Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak tahun 2019 sebesar **0,0065 %**.
- Target indikator kinerja Persentase Anggaran yang Responsif Gender tahun 2019 sebesar **19,98 %**.

A. Capaian Kinerja

Pedoman pengukuran pencapaian kinerja sasaran menggunakan skala ordinal seperti disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja :

JUMLAH NILAI	KATEGORI
85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
70 s/d kurang dari 85	Berhasil
55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
Kurang dari 55	Tidak berhasil

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja

tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Nilai capaian menggunakan skala ordinal, penilaian indikator kinerja sasaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2019, menunjukkan kategori capaian sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 :

No.	Indikator Kinerja	Sat.	2018 Realisasi	2019		
				Target	Realisasi	Capaian
A.	Tujuan :					
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	-	90,76	90,68	99,91
B.	Sasaran :					
1.	Persentase sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (PA)	%	73,12	73,00	75,14	102,93
2.	Persentase tahapan keluarga Pra-S dan KS-I	%	40,11	40,25	39,72	101,31
3.	Persentase kekerasan perempuan & anak	%	0,0087	0,0065	0,0067	96,92
4.	Persentase Anggaran yang Responsif Gender	%	-	19,98	3,16	15,85

Sumber : Dinas KB-PP

Penjelasan singkat capaian indikator kinerja tujuan dan masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

● **Tujuan :**

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan hak dasar ini, maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara, selain mendapatkan manfaat dari partisipasinya dalam masyarakat. Hak dasar yang dicakup diantaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan lingkungan sosial yang layak. Namun, dalam pengukuran pembangunan manusia, hanya tiga dimensi yang diukur, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

Merujuk pada UNDP bahwa untuk mengevaluasi sejauh mana gambaran ketidaksetaraan gender diperlukan sebuah indikator komposit yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur rata-rata geometric pencapaian dalam kemampuan dasar, sama seperti dalam IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Sebagai indikator komposit, IPG memberikan gambaran secara agregat, sedangkan implementasi hasil penghitungan IPG dalam program pembangunan membutuhkan kajian lebih jauh pada indikator yang berkaitan dengan komponen penyusun IPG. Komponen pembentuk IPG yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berdasarkan kelompok gender.

Capaian indikator Tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. :
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa
Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kode	Kabupaten / Kota	UHH		EYS		MYS		Pengeluaran per Kapita		IPM		IPG
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
3500	Jawa Timur	69,30	73,15	13,23	13,15	8,18	7,04	16.837	10.137	76,00	69,09	90,91
3514	Pasuruan	68,14	72,08	12,47	12,28	7,78	6,68	14.058	8.707	72,44	65,69	90,68

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan capaian indikator tujuan di atas, maka sasaran tujuan yaitu **Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat** dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** menghasilkan angka 90,68 % atau mencapai 99,91 % dari target tahun 2019 sebesar 90,76 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

● **Sasaran :**

1. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

► Sasaran Meningkatkan Kesertaan ber-KB

a). Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif

Prosentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif menggambarkan jumlah pasangan usia subur yang menjadi Peserta KB aktif melalui metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi dibagi menjadi 2 macam yakni Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implan, Metoda Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP) serta Non MKJP dengan suntik, kondom dan pil KB.

Melalui kepesertaan ber-KB keluarga diharapkan keluarga dapat mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak sehingga tercipta keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas.

Pertimbangan diterapkannya indikator ini adalah dengan semakin banyaknya akseptor KB mengindikasikan masyarakat telah peduli dan sadar untuk membentuk keluarga kecil yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Program Keluarga Berencana diarahkan pada Pasangan Usia Subur (PUS).

Berikut ini hasil data Realisasi indikator kinerja persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif (PA) pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel, grafik dan rumus perhitungan sbb :

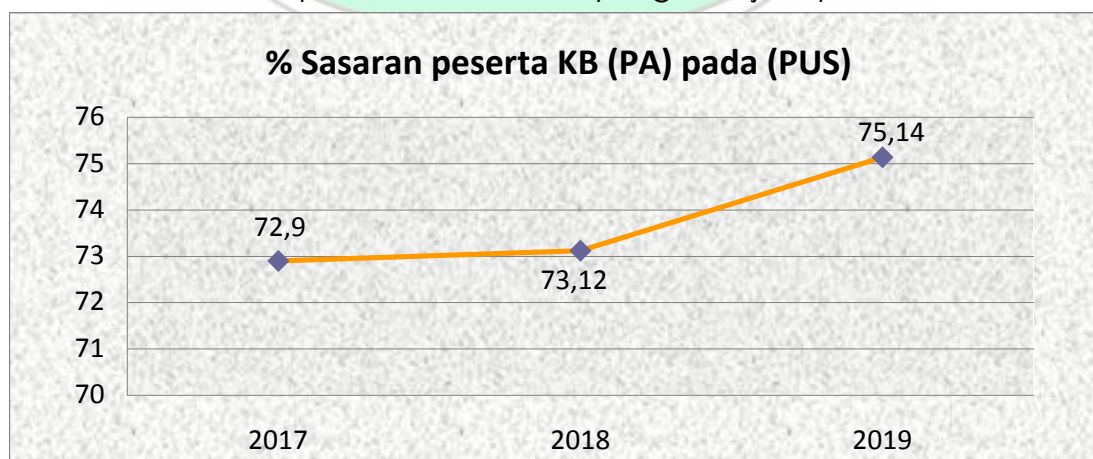
Gambar 3.1.: Rumus Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100 \%$$

Tabel 3.4. : Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif :

Uraian / Data	2018	2019	Selisih
Jumlah peserta KB aktif (PA)	254.126 org	273.503 org	19.377 org
Jumlah pasangan usia subur (PUS)	347.570 kk	363.982 kk	16.412 kk
Persentase sasaran pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	73,12 %	75,14 %	2,02 %

Grafik 3.1. : Capaian sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif



Sumber : Dinas KB-PP

Dilihat dari tabel dan grafik diatas pada tahun 2019 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sejumlah 273.503 orang atau



Gambar.3.2.
Pelayanan KB (MOW)

75,14 % dari Jumlah pasangan usia subur sebanyak 363.982 kk. Capaian tahun 2019 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 sebesar 73,00 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018

sebesar 73,12 %, maka capaian sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 19.377 akseptor atau sebesar 2,02 % yang berarti bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.

Faktor-faktor yang mendorong Pasangan Usia Subur melakukan metode kontrasepsi adalah :

- a. Faktor Pengetahuan, hal ini terbentuk karena adanya kegiatan seperti sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan untuk mengajak dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial dan KB Momentum.
- b. Faktor dukungan Suami, dukungan keluarga adalah kemampuan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan dukungan dan bantuan bila diperlukan. dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan sosial internal seperti dukungan dari suami, atau dukungan dari saudara kandung dan keluarga eksternal di keluarga inti (dalam jaringan besar sosial keluarga). Tindakan akan terlaksana dengan baik jika ada dukungan.

Tabel 3.5. :
Program Pendukung Indikator Kinerja
(Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	BIDANG KB dan DALDUK :			
1.	Keluarga Berencana;	8.074.061.380,-	5.810.800.211,-	71,91
2.	Pelayanan Kontrasepsi;	61.390.000,-	30.461.162,-	49,62
3.	Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;	70.381.000,-	65.843.500,-	93,55
4.	Peningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB;	1.138.531.000,-	1.034.458.350,-	90,86
TOTAL		9.344.363.380,-	6.941.563.223,-	74,29

Program sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif tersebut didukung oleh 4 program dengan nilai total anggaran sebesar Rp 9.344.363.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.941.563.223,- atau 74,29 % dari anggaran yang ditetapkan.

Kenaikan jumlah Peserta aktif dipengaruhi oleh terbukanya akses pelayanan KB yang semakin dekat dengan masyarakat, adanya pelayanan KB momentum antara lain TNI Manunggal KB, Kesatuan Gerak PKK, Bakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia (IBI) , Bakti Sosial Polri, Hari Keluarga Nasional, serta adanya sistem pelayanan KB Mobil. Jika dilihat dari target yang ditetapkan tahun 2019 yang semestinya 73,00 % dapat tercapai 75,14 %. Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk yaitu Terciptanya keluarga kecil yang sehat dan berkualitas dengan indikator **Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif** menghasilkan angka capaian sebesar 102,93 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

2. Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

- Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan berkualitas

a). Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1

Realisasi indikator kinerja Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1 pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel, grafik dan rumus perhitungan sbb :

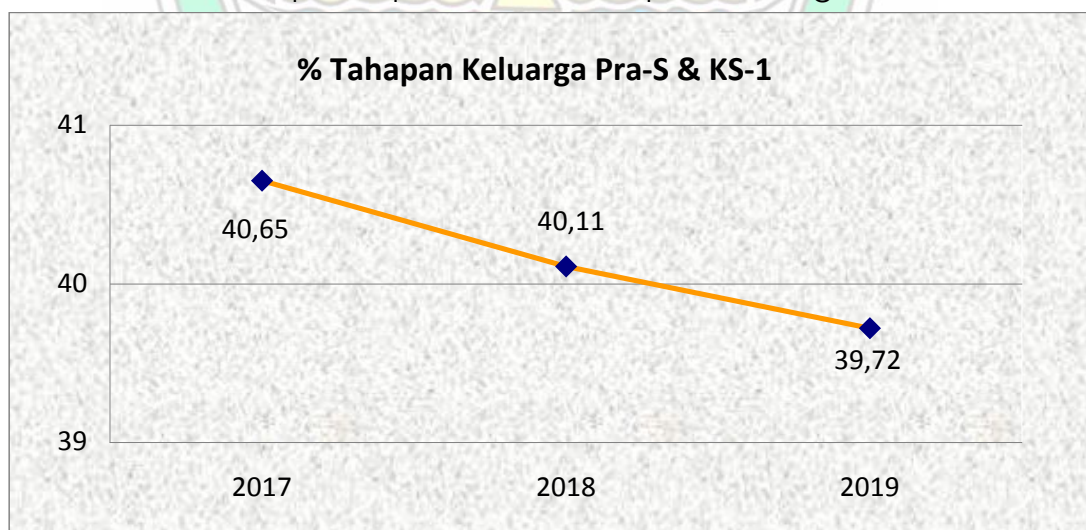
Gambar 3.3. : Rumus Persentase tahapan keluarga Pra-S & KS-I

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-I}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100 \%$$

Tabel 3.6. Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1 :

Uraian / Data	2018	2019	Selisih
Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I	198.286 kk	197.750 kk	536 kk
Jumlah Keluarga	494.414 kk	497.809 kk	3.395 kk
Persentase tahapan keluarga sejahtera yang Pra-S dan KS-I	40,11 %	39,72 %	0,39 %

Grafik 3.2. : Capaian persentase tahapan keluarga Pra-S & KS-I



Sumber : Dinas KB-PP

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-I) pada tahun 2019 mencapai 197.750 kk atau 39,72 % dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 497.809 kk. Jumlah ini menurun sebesar 0,39 % bila dibandingkan dengan th. 2018 yang mencapai 40,11 %. Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi.



Gambar 3.4. :
Kegiatan Bhakti Sosial

Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan

pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatannya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan social psikologis (*social psychological needs*).

Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra-S dan KS-I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. dengan program anggaran yang ada pada Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan (sebagaimana tabel Realisasi Anggaran).

Tabel 3.7. :
Program Pendukung Indikator Kinerja
(Persentase tahapan keluarga Pra-S dan KS-I)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	BIDANG K3P :			
1.	Keluarga Sejahtera;	605.000.000,-	601.387.560,-	99,40
2.	Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;	482.574.500,-	401.909.220,-	83,28
3.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;	196.000.000,-	176.269.773,-	89,93
4.	Pengembangan Model Tri-Bina (BKB, BKR, BKL);	167.250.000,-	155.920.524,-	93,23
5.	Pengembangan Lingkungan Sosial.	150.000.000,-	135.228.100,-	90,15
TOTAL		1.600.824.500,-	1.470.715.177,-	91,87

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan (K3P) yaitu Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan berkualitas dengan indikator **Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1** menghasilkan angka capaian sebesar 101,31 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

► Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak :

a). Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan World Health Organization (WHO), antara 40 hingga 70 persen perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.4. dan grafik 3.3. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

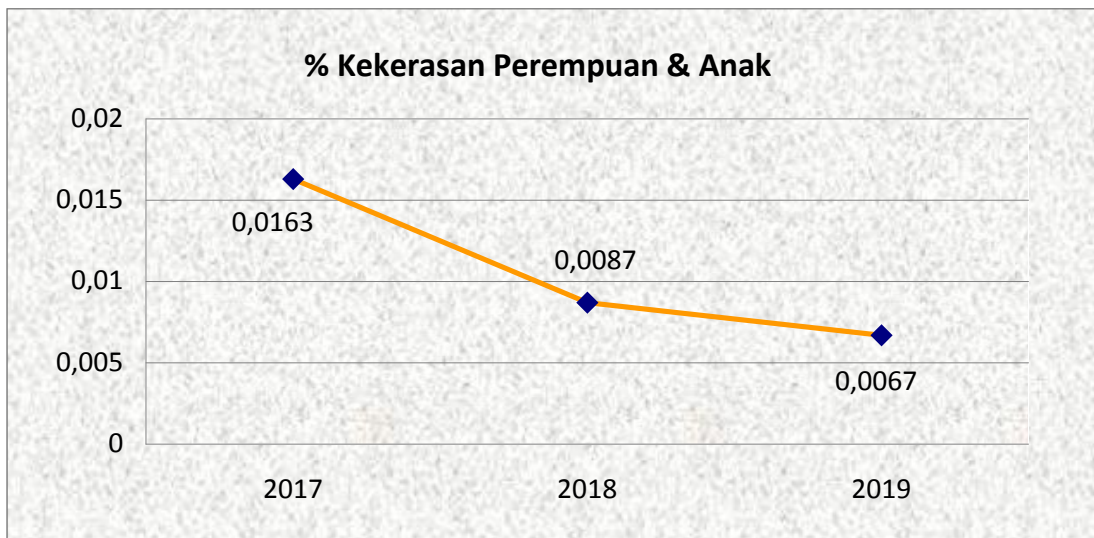
Gambar 3.5. : Rumus Persentase kekerasan Perempuan & Anak

$$\frac{\text{Jumlah Kekerasan Perempuan \& Anak}}{\text{Jumlah Perempuan \& Anak}} \times 100 \%$$

Tabel 3.8. Persentase Kekerasan Perempuan & Anak

Uraian / Data	2018	2019
Jumlah kekerasan perempuan dan anak	39 kasus	55 kasus
Jumlah Rumah Tangga	449.450 kk	-
Jumlah perempuan & anak	-	820.893 jiwa
Persentase kekerasan perempuan dan anak	0,0087 %	0,0067 %

Grafik 3.3. : Capaian persentase kekerasan perempuan & anak



Sumber : Dinas KB-PP

Data tersebut menunjukkan capaian sebesar 0,0067 % atau penurunan persentase kekerasan perempuan dan anak sebesar 0,002



% bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 0,0087 %. Capaian tersebut juga telah memenuhi target sebesar 96,92 % dari target tahun 2019 yaitu 0,0065 %. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat keberanian, kesadaran

dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keberhasilan program inovasi SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Dengan semakin banyak kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Dengan dukungan program anggaran yang ada pada Bidang PP-PA (sebagaimana tabel Realisasi Anggaran).

Tabel 3.9. :
Program Pendukung Indikator Kinerja
(Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	BIDANG PP-PA :			
1.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan;	64.952.000,-	62.274.000,-	95,88
2.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;	80.833.000,-	67.482.000,-	83,48
TOTAL		145.785.000,-	129.756.000,-	89,00

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran Bidang PP-PA yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator **Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak** menghasilkan angka capaian sebesar 96,92 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

b). Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan bagian dari pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*). Harus dipahami bahwa PPRG bukanlah merupakan suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, namun PPRG merupakan alat dan bukan tujuan. Dalam penyusunan PPRG dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Penyusunan PPRG wajib mendasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu Ekonomis, Efisien Dan Efektif serta menambahkan prinsip Equity (E). Teknis penyusunan PPRG di daerah dapat dilakukan melalui

(1) analisis gender dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP), (2) penyusunan *Gender Budget Statement*/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).

Anggaran Responsif Gender (ARG) terbagi dalam 3 kategori yaitu : (1) anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki, (2) anggaran



Gambar 3.7 : Kegiatan Bimtek ARG

kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender, (3) anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender. Tujuannya adalah untuk membuka cakrawala pemikiran baru, dan sebagai acuan para perencana OPD pada instansi Pemerintah. Selain itu, diharapkan para perencana pada unit organisasi dapat mengembangkan indikator kinerja responsif gender dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Anggaran yang Responsif Gender tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.10. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Gambar 3.8. : Rumus Persentase ARG

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran Belanja Langsung}} \times 100 \%$$

Tabel 3.10. Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Uraian / Data	2018	2019
Jumlah ARG	-	Rp. 37.996.522.084
Total Anggaran (BL)	-	Rp. 1.201.692.208.820
Persentase ARG	-	3,16 %

Tabel 3.11. :
Program Pendukung Indikator Kinerja
(Persentase Anggaran yang Responsif Gender)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	BIDANG PP-PA :			
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;	980.000.000,-	892.309.808,-	91,05
2.	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.	123.787.000,-	119.495.000,-	96,53
	TOTAL	1.103.787.000,-	1.011.804.808,-	91,66

Berdasarkan capaian indikator sasaran di atas, maka sasaran Bidang PP-PA yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator **Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)** menghasilkan angka capaian sebesar 15,85 % dan termasuk dalam kategori **Tidak berhasil**.

Capaian indikator kinerja kegiatan terdapat pada Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) seperti pada *Lampiran 2*. Adapun formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada *Lampiran 3*.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.12. :
Realisasi Anggaran Dinas KB-PP Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	(%)
1.	Belanja Langsung dan Tidak Langsung :		
	- Pagu Anggaran	18.764.264.600,-	100
	- Realisasi	14.313.099.043,-	76,28
	- Efisiensi	4.451.165.557,-	23,72
2.	Belanja Tidak Langsung :		
	- Pagu Anggaran	4.498.308.000,-	100
	- Realisasi	2.738.330.968,-	60,87
	- Efisiensi	1.759.977.032,-	39,13
3.	Belanja Langsung :		
	- Pagu Anggaran	14.265.956.600,-	100
	- Realisasi	11.574.768.075,-	81,14
	- Efisiensi	2.691.188.525,-	18,86
4.	Umum / Sekretariat :		
	- Pagu Anggaran	2.071.196.720,-	100
	- Realisasi	2.020.928.867,-	97,57
	- Efisiensi	50.267.853,-	2,43
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan :		
	- Pagu Anggaran	12.194.759.880,-	100
	- Realisasi	9.553.839.208,-	78,34
	- Efisiensi	2.640.920.672,-	21,66

Dengan rincian realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13. : Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019 :

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	EFISIENSI (Rp)	(%)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG :	4.498.308.000,-	2.738.330.968,-	60,87	1.759.977.032,-	39,13
1.	Gaji Pegawai	4.498.308.000,-	2.738.330.968,-	60,87	1.759.977.032,-	39,13
II.	BELANJA LANGSUNG :	14.265.956.600,-	11.574.768.075,-	81,14	2.691.188.525,-	18,86
A.	UMUM / SEKRETARIAT :	2.071.196.720,-	2.020.928.867,-	97,57	50.267.853,-	2,43
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran;	1.383.221.900,-	1.352.873.576,-	97,81	28.904.624,-	2,09
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;	522.250.000,-	515.160.491,-	98,64	7.089.509,-	1,36
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	165.724.820,-	152.894.800,-	92,26	12.830.020,-	7,74
B.	BIDANG KB dan DALDUK :	9.344.363.380,-	6.941.563.223,-	74,29	2.402.800.157,-	25,71
1.	Keluarga Berencana;	8.074.061.380,-	5.810.800.211,-	71,91	2.263.261.169,-	28,03
2.	Pelayanan Kontrasepsi;	61.390.000,-	30.461.162,-	49,62	30.928.838,-	50,38
3.	Rancangan Induk Pengendalian Penduduk;	70.381.000,-	65.843.500,-	93,55	4.537.500,-	6,45
4.	Peningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB;	1.138.531.000,-	1.034.458.350,-	90,86	104.072.650,-	9,14
C.	BIDANG K3P :	1.600.824.500,-	1.470.715.177,-	91,87	130.109.323,-	8,13
1.	Keluarga Sejahtera;	605.000.000,-	601.387.560,-	99,40	3.612.440,-	0,60
2.	Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;	482.574.500,-	401.909.220,-	83,28	80.665.280,-	16,72
3.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;	196.000.000,-	176.269.773,-	89,93	19.730.227,-	10,07
4.	Pengembangan Model Tri-Bina (BKB, BKR, BKL);	167.250.000,-	155.920.524,-	93,23	11.329.476,-	6,77
5.	Pengembangan Lingkungan Sosial.	150.000.000,-	135.228.100,-	90,15	14.771.900,-	9,85
D.	BIDANG PP-PA :	1.249.572.000,-	1.141.560.808,-	91,36	108.011.192,-	8,64
1.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;	980.000.000,-	892.309.808,-	91,05	87.690.192,-	8,95
2.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan;	64.952.000,-	62.274.000,-	95,88	2.678.000,-	4,12
3.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;	80.833.000,-	67.482.000,-	83,48	13.351.000,-	16,52
4.	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.	123.787.000,-	119.495.000,-	96,53	4.292.000,-	3,47
PK Perubahan (B+C+D)		12.194.759.880,-	9.553.839.208,-	78,34	2.640.920.672,-	21,66
TOTAL (I+II)		18.764.264.600,-	14.313.099.043,-	76,28	4.451.165.557,-	23,72

Berdasarkan hasil tabulasi dan rekapitulasi realisasi anggaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2019 didapatkan hasil bahwa realisasi anggaran Belanja Langsung sebesar 81,14 % (Rp. 11.574.768.075,-) dengan efisiensi sebesar 18,86 % (Rp. 2.691.188.525,-). disamping itu secara umum capaian dari masing-masing program sudah diatas 75 %, berdasarkan tabel diatas, dari 16 program terdapat 15 program yang capaiannya sudah diatas 75% dan hanya ada 1 (satu) program yang capaian realisasinya dibawah 75 % yaitu program Pelayanan Kontrasepsi yang terdapat anggaran Rp. 61.390.000,- sedangkan dana yang terserap hanya sebesar Rp. 30.461.162,- (49,62%). Hal itu dikarenakan dana kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi ada support dan sharing dana dari APBN (BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Timur), serta tidak ada akseptor yang mengalami kegagalan dan komplikasi akibat pemakaian alat kontrasepsi, sehingga dana sebesar Rp. 30.928.838,- (50,38 %) tidak terserap.

C. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai tertinggi dari evaluasi LKjIP adalah AA (Sangat Memuaskan), dengan skor >90 – 100, sedangkan A (Memuaskan) skornya >80 – 90, BB (Sangat Baik) dengan skor >70 – 80, B (Baik) dengan skor >60 – 70, CC (Cukup atau memadai) dengan skor >50 – 60, C (Kurang) dengan skor >30 – 50, dan nilai D (Sangat Kurang) dengan skor 0 – 30.

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas, dalam evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan mendapatkan nilai 80,08 dan termasuk dalam kategori A (Memuaskan).

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pencapaian target sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 melalui kegiatan operasional dengan serangkaian Program dan Kegiatan yang dijalankan oleh Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh hasil sebagai berikut :

► Tujuan :

- Sasaran tujuan “Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat” dengan indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) menghasilkan angka 90,68 % atau capaian sebesar 99,91 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,76 %, dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

► Sasaran :

1. Sasaran strategis Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk “Meningkatnya Kesertaan ber-KB” dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif (PA) menghasilkan angka capaian 75,14 % atau sebesar 102,93 % melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 73 %, dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
2. Sasaran strategis Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan “Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas” dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I menghasilkan angka capaian

39,72 % atau sebesar 101,31 % melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 40,25 %, dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

3. Sasaran strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak " Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak menghasilkan angka capaian sebesar 0,0067 % atau sebesar 96,92 % dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
- Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) menghasilkan angka capaian sebesar 3,16 % atau sebesar 15,83 % dan termasuk dalam kategori **Tidak Berhasil**.

B. Permasalahan Terkait Capaian Kinerja

1. Ketidak berhasilan dalam pencapaian indikator sasaran Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- Kurangnya pemahaman yang cukup mengenai sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
- Kurangnya pemahaman yang memadai mengenai manajemen berbasis kinerja
- Kurangnya pemahaman tentang isu gender dan PUG serta alat analisis gender
- Kurangnya pelatihan atau pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah, maupun dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG)

C. Strategi Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan diatas dan permasalahan yang muncul khususnya terkait dengan Ketidak berhasilan dalam pencapaian indikator sasaran Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) dilaksanakan strategi pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi tentang petunjuk penyusunan Anggaran Responsif Gender dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat pusat, maupun dengan Dinas KB dan PP di tingkat Daerah.
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, advokasi terkait perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
4. Memberikan pendampingan dan supervisi kepada perencana di setiap OPD secara komprehensif dan berkesinambungan dalam meningkatkan pemahaman tentang PPRG.

Pasuruan, 24 Pebruari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KABUPATEN PASURUAN



drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG

Pembina Utama Muda

NIP. 19630626 199102 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Jabatan : Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. M. IRSYAD YUSUF, S.E, M.M.A.
Jabatan : Bupati Pasuruan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 1 Nopember 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	%	73,00
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	2. Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	%	40,25
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	%	19,98
		4. Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	0,0065

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Keluarga Berencana	8.074.061.380,-	APBD
2.	Pelayanan Kontrasepsi	61.390.000,-	APBD
3.	Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	70.381.000,-	APBD
4.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	1.138.531.000,-	APBD
5.	Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	482.574.500,-	APBD
6.	Keluarga Sejahtera	605.000.000,-	APBD
7.	Pembinaan Lingkungan Sosial	150.000.000,-	APBD
8.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	196.000.000,-	APBD
9.	Pengembangan Model Tri-Bina	167.250.000,-	APBD
10.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	980.000.000,-	APBD
11.	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	123.787.000,-	APBD
12.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	64.952.000,-	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
13.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	80.833.000,-	APBD
TOTAL		12.194.759.880,-	

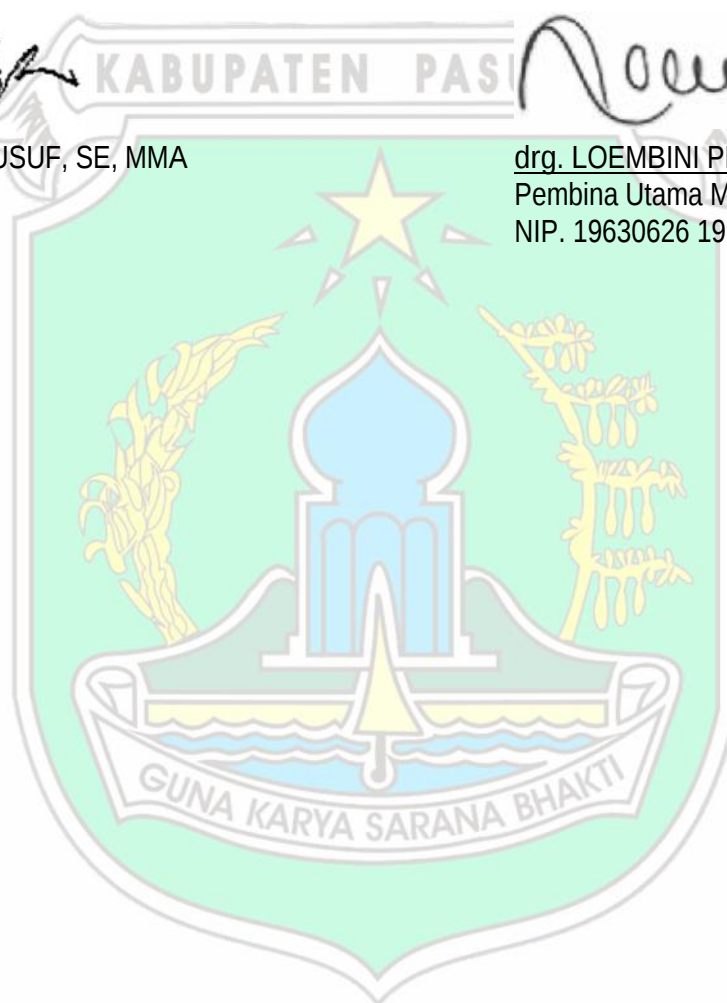
Pasuruan, 1 Nopember 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001



Lampiran 2.

Formulir PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (P K K)

OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
Tahun : 2019

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	Belanja Tidak Langsung :								
	1. Belanja Pegawai	<u>OUTCOME</u> : Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	100 %	100 %	100	4.498.308.000,-	2.738.330.968,-	60,87	
	- Gaji	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah gaji	12 bln	12 bln	100	4.498.308.000,-	2.738.330.968,-	60,87	
II.	Belanja Langsung :								
	1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<u>OUTCOME</u> : Prosentase kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100,00	1.383.221.900,-	1.352.873.576,-	97,81	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah tagihan/rekening Telp/internet, Air dan Listrik	12 bln	12 bln	100,00	99.598.400,-	89.383.396,-	89,74	
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	100,00	96.600.000,-	90.770.000,-	93,96	
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	100,00	35.000.000,-	34.562.200,-	98,75	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	12 bln	100,00	24.500.000,-	24.256.000,-	99,00	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln	100,00	17.500.000,-	15.917.500,-	90,96	
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bln	12 bln	100,00	85.000.000,-	84.975.000,-	99,97	
	- Penyediaan Jasa Perkantoran	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Jasa Perkantoran	12 bln	12 bln	100,00	823.800.000,-	814.714.000,-	98,90	
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bln	12 bln	100,00	201.223.500,-	198.295.480,-	98,54	
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	OUTCOME : Prosentase Sarana terhadap Prasarana yang tersedia	100 %	100 %	100,00	522.250.000,-	515.160.491,-	98,64	
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gdg Kantor	6 pkt	6 pkt	100,00	14.250.000,-	14.250.000,-	100,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pengadaan Peralatan Kantor	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kebutuhan Peralatan Kantor	7 unit	7 unit	100,00	33.000.000,-	32.700.000,-	99,09	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Gedung Kantor yang di perbaiki	12 bln	12 bln	100,00	70.000.000,-	70.000.000,-	100,00	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kbthn pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bln	12 bln	100,00	20.000.000,-	19.951.000,-	99,76	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Prosentase Kendaraan yang diperbaiki	12 bln	12 bln	100,00	385.000.000,-	378.259.491,-	98,25	
3.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	<u>OUTCOME</u> : Prosentase kesertaan dalam keg Sistem Pelap. Capaian Kinerja & Keuangan	100 %	100 %	100,00	165.724.820,-	152.894.800,-	92,26	
	- Bimbingan Tehnis PLKB/PKB tentang R/R	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Bimtek tentang R/R	1 keg	1 keg	100,00	17.000.000,-	16.720.000,-	98,35	
	- Pelatihan Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Pelatihan Pencatatan Pelayanan KB	1 keg	1 keg	100,00	69.524.820,-	67.101.300,-	96,51	
	- Desiminasi Pencatatan dan Pelaporan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Desiminasi Pencatatan dan Pelaporan	1 keg	1 keg	100,00	53.200.000,-	45.342.000,-	85,23	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Forum OPD	1 keg	1 keg	100,00	26.000.000,-	23.731.500,-	91,28	
4.	KELUARGA BERENCANA	<u>OUTCOME</u> : Prosentase meningkatnya Akseptor KB baru	100 %	90 %	89,68	8.074.061.380,-	5.810.800.211,-	71,97	
	- Pelayanan KIE	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah keg. Pelayanan KIE	17 keg	17 keg	100,00	50.180.000,-	47.393.200,-	94,45	
	- Tentara Manunggal KB dan Kesehatan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah keg. Gelar TMKK	1 keg	1 keg	100,00	38.500.000,-	34.736.400,-	90,22	
	- Peningkatan Pelayanan KB Momentum	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pelayanan KB Momentum	24 keg	24 keg	100,00	231.055.830,-	216.181.100,-	93,56	
	- Sosialisasi Kontrasepsi KB Rasional	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Sosialisasi KB Rasional	1 keg	1 keg	100,00	15.499.800,-	11.804.700,-	76,16	
	- Operasional Penyuluhan Kependudukan dan Keluarga Berencana	<u>INPUT</u> : DAU / DAK <u>OUTPUT</u> : Jumlah kebutuhan Operasional Penyuluhan Kependudukan dan KB	12 bln	12 bln	100,00	6.741.525.000,-	4.528.098.611,-	67,17	
	- Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Fasilitasi & Pembinaan Kampung KB	24 kec	14 kec	58,33	50.000.000,-	29.571.000,-	59,14	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Medis Teknis KKBPK	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Medis Teknis KKBPK	4 keg	4 keg	100,00	20.000.000,-	18.800.000,-	94,00	
	- Pembinaan Kelompok KB Pria	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok KB Pria	1 keg	1 keg	100,00	8.500.000,-	7.000.000,-	82,35	
	- Temu Kader PPKBD	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Temu Kader PPKBD	1 keg	1 keg	100,00	102.890.250,-	102.606.400,-	99,72	
	- Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah kegiatan Pembinaan PPKBD dan Sub	12 bln	12 bln	99,88	815.910.500,-	814.608.800,-	99,84	
5.	PELAYANAN KONTRASEPSI	OUTCOME : Prosentase Pelayanan Kontrasepsi	100 %	60 %	60,00	61.390.000,-	30.461.162,-	49,62	
	- Pelayanan KB Medis Operasi	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah Pelayanan KB Medis Operasi	4 keg	3 keg	75,00	58.500.000,-	28.846.000,-	49,31	
	- Pengayoman Kontrasepsi (Komplikasi dan Kegagalan)	INPUT : DAU OUTPUT : Jumlah Akseptor Kegagalan dan Komplikasi	6 org	3 orang	50,00	2.890.000,-	1.615.162,-	55,89	
6.	RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK	OUTCOME : Prosentase kegiatan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100 %	100 %	100,00	70.381.000,-	65.843.500,-	93,55	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Sosialisasi Dimensi Kependudukan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Sosialisasi Dimensi Kependudukan	2 keg	2 keg	100,00	32.481.000,-	31.828.500,-	97,99	
	- Pembinaan Koalisi Kependudukan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pembinaan Koalisi Kependudukan	1 keg	1 keg	100,00	37.900.000,-	34.015.000,-	89,75	
7.	PENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KB	<u>OUTCOME</u> : Prosentase kebutuhan Sarpras PKB/PLKB	100 %	100 %	100,00	1.138.531.000,-	1.034.458.350,-	90,86	
	- Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jml Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan	172 unit	172 unit	100,00	471.752.000,-	410.472.950,-	87,01	
	- Pengadaan Sarana Pendataan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kebutuhan Sarana Pendataan	32 unit	32 unit	100,00	419.972.000,-	395.089.900,-	94,08	
	- Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kebutuhan Sarana Petugas Lapangan KB	365 unit	365 unit	100,00	246.807.000,-	228.895.500,-	92,74	
8.	KELUARGA SEJAHTERAH	<u>OUTCOME</u> : Prosentase tahapan KS	100 %	100 %	100,00	605.000.000,-	601.387.560,-	99,40	
	- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk daerah Kab /Kota dlm Pemb Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah keg Peningkatan peranserta Org Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab	12 bln	12 bln	100,00	605.000.000,-	601.387.560,-	99,40	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YG MANDIRI	<u>OUTCOME</u> : Prosentase Pembinaan KB/KR Mandiri	100 %	99 %	98,97	482.574.500,-	401.909.220,-	83,28	
-	Pendataan Keluarga Sejahtera	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Pendataan Keluarga	365 ds/kl	365 ds/kl	100,00	96.254.500,-	92.554.500,-	96,16	
-	Gelar Produk Unggulan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Gelar Produk Unggulan	3 keg	3 keg	100,00	52.500.000,-	43.808.612,-	83,44	
-	Pelatihan/Pembinaan Pengelola UPPKS	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pelatihan/ Pembinaan Pengelola UPPKS	3 keg	3 keg	100,00	20.000.000,-	18.098.500,-	90,49	
-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah (PusyanGatra)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pusyangatra	7 keg	3 keg	42,86	38.000.000,-	11.318.858,-	29,79	
-	KIE Berbagai Media dan Mupen	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan KIE Berbagai Media Mupen	12 keg	12 keg	100,00	275.820.000,-	236.128.750,-	85,61	
10.	PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	<u>OUTCOME</u> : Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100 %	100 %	100,00	150.000.000,-	135.228.100,-	90,15	
-	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja	6 keg	6 keg	100,00	150.000.000,-	135.228.100,-	90,15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	<u>OUTCOME</u> : Prosentase Layanan Informasi dan Konseling KRR	100 %	100 %	100,00	196.000.000,-	176.269.773,-	89,93	
-	Pembinaan Anggota PIK KRR	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Pembinaan Anggota PIK KRR	2 keg	2 keg	100,00	60.000.000,-	56.459.273,-	94,10	
-	Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Sosialisasi PIK Remaja Berbasis Sekolah	4 keg	4 keg	100,00	40.000.000,-	38.375.000,-	95,94	
-	Jambore PIK Remaja	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Jambore PIK Remaja	1 keg	1 keg	100,00	36.000.000,-	33.859.000,-	94,05	
-	Fasilitasi Saka Kencana	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan fasilitasi Saka Kencana	3 keg	3 keg	100,00	15.000.000,-	10.350.000,-	69,00	
-	Jambore Saka Kencana	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Jambore Saka Kencana	1 keg	1 keg	100,00	20.000.000,-	17.900.000,-	89,50	
-	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK-R	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi PIK-R	1 keg	1 keg	100,00	25.000.000,-	19.326.500,-	77,31	
12.	PENGEMBANGAN MODEL TRI-BINA (BKB, BKR, BKL)	<u>OUTCOME</u> : Persentase Pengembangan Model Tri-Bina	100 %	100 %	100,00	167.250.000,-	155.920.524,-	93,23	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	4 keg	4 keg	100,00	90.000.000,-	84.662.654,-	94,07	
	- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	1 keg	1 keg	100,00	47.250.000,-	45.079.870,-	95,41	
	- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	2 keg	2 keg	100,00	15.000.000,-	13.678.000,-	91,19	
	- Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	4 keg	4 keg	100,00	15.000.000,-	12.500.000,-	83,33	
13.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	<u>OUTCOME</u> : Prosentase Penguatan Kelembagaan PUG & Anak	100 %	100 %	100,00	980.000.000,-	892.309.808,-	91,05	
	- Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	3 keg	3 keg	100,00	403.950.000,-	362.869.308,-	89,83	
	- Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan fasilitasi KLA	7 keg	7 keg	100,00	376.050.000,-	345.645.500,-	91,91	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah kegiatan fasilitasi PPT-PPA	6 keg	6 keg	100,00	200.000.000,-	183.795.000,-	91,90	
14.	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	<u>OUTCOME</u> : Persentase Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100 %	100 %	100,00	123.787.000,-	119.495.000,-	96,53	
	- Pelatihan Kewirausahaan bagi Organisasi Perempuan	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dlm Organisasi Perempuan	6 keg	6 keg	100,00	89.991.000,-	85.879.000,-	95,43	
	- Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Meningkatkan Usaha Ekonomi Keluarga	2 keg	2 keg	100,00	33.796.000,-	33.616.000,-	99,47	
15.	KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	<u>OUTCOME</u> : Persentase keg sosialisasi ttg Keserasian Kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100 %	100 %	100,00	64.952.000,-	62.274.000,-	95,88	
	- Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 keg	4 keg	100,00	64.952.000,-	62.274.000,-	95,88	
16.	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<u>OUTCOME</u> : Persentase Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	100 %	100 %	100,00	80.833.000,-	67.482.000,-	83,48	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan KDRT	1 keg	1 keg	100,00	59.837.500,-	47.227.000,-	78,93	
	- Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Wanita (KESPRO)	<u>INPUT</u> : DAU <u>OUTPUT</u> : Jumlah Kegiatan Sosialisasi (KESPRO)	1 keg	1 keg	100,00	20.995.500,-	20.255.000,-	96,47	
a.	Belanja Tidak Langsung					4.498.308.000,-	2.738.330.968,-	60,87	
b.	Belanja Langsung :					14.265.956.600,-	11.574.768.075,-	81,14	
	- Sekretariat / Penunjang (Program 1 s/d 3)					2.071.196.720,-	2.020.928.867,-	97,57	
	- Perjanjian Kinerja Perubahan (Program 4 s/d 16)					12.194.759.880,-	9.553.839.208,-	78,34	
c.	Total (a + b)					18.764.264.600,-	14.313.099.043,-	76,28	



Pasuruan, 24 Pebruari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KAB. PASURUAN

 drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran 3.

Formulir PPS

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
(P P S)**

OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	Capaian Kinerja Th.2019											
				s/d Triwulan-I			s/d Triwulan-II			s/d Triwulan-III			s/d Triwulan-IV		
				Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
1.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1.1 Persentase sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	%	17,92	10,92	60,90	46,06	27,60	59,91	65,76	35,37	53,79	73,00	75,14	102,93
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	2.1 Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-1	%	15,00	6,02	159,87	27,80	15,22	145,26	35,35	19,50	144,83	40,25	39,72	101,31
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.1 Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	%	0,0009	0,0010	92,60	0,0044	0,0025	143,64	0,0062	0,0031	149,24	0,0065	0,0067	96,92
		3.2 Persentase Anggaran yang Responsif Gender	%	2,78	2,99	107,40	13,40	3,02	22,53	19,07	3,10	16,26	19,98	3,16	15,83
Rata-rata Tingkat Pencapaian Sasaran			%			105,19			92,83			91,03			79,24



Pasuruan, 24 Pebruari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KAB. PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran 4.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

Formulir RS

OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan

VISI : " Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing "

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
			Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan Pokok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan- pendidikan Formal dan Non Formal sebagai Wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan	Meningkatkan Kesenjangan Masyarakat	1. Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1. Persentase Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	- Peningkatan Cakupan Akseptor MKJP - Pelayanan Akseptor KB yang Berkualitas - Pemerataan Kelengkapan Dukungan Pelayanan dan penyuluhan KB di Kampung KB	- Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	- KIE dan Pelayanan KB - Biaya Operasional KB - Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD - Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB - Pencatatan Pelaporan dan Pendataan Keluarga - Pembinaan Koalisi Kependudukan - Sosialisasi Dimensi Kependudukan
			2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	2. Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	- Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan bagi Akseptor KB Keluarga Pra-S dan KS-1 - Dukungan Sarana Prasarana bagi Komunitas Genre dan Forum Anak - Optimalisasi Kampung KB dan Komunitas GenRe - Pembangunan dan Ketahanan Keluarga	- Pembinaan Lingkungan Sosial - Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerak	- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat - Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - KIE Berbagai Media dan Mupen - Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR - Pembinaan Tri-bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kab /Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	- Optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak - Peningkatan Gender Equality (kesetaraan gender di semua bidang) - Optimalisasi Tim Pendamping Kekerasan Tingkat Desa/Kelurahan dan Forum Anak - Penguatan Korban Kekerasan secara Fisik, Psikologis dan Ekonomi	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Pelaksanaan KIE tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) - Pelatihan Peningkatan Ketrampilan bagi Organisasi Perempuan dan Masyarakat - Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) - Fasilitasi Perlindungan Perempuan (PP) - Fasilitasi Perlindungan Anak (PA) - Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
				4. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	- Peningkatan Anggaran yang Responsive Gender		

Pasuruan, 24 Pebruari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KAB. PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran 5.

Formulir RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T)

OPD : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
Tahun : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th. 2020	Target Kinerja per-Triwulan			
				I	II	III	IV
1.	Terciptanya Keluarga Berkualitas melalui Kesertaan ber KB	1.1. Persentase sasaran PUS yang menjadi peserta KB Aktif	73,20 %	28,59 %	51,19 %	62,67 %	73,20 %
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	2.1. Persentase tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	40,00 %	15,62 %	27,96 %	34,24 %	40,00 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3.1. Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	0,0060 %	0,0023 %	0,0042 %	0,0051 %	0,0060 %
		3.2. Prosentase Anggaran yang Responsif Gender	21,48 %	8,39 %	15,01 %	18,38 %	21,48 %

Pasuruan, 24 Pebruari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KAB. PASURUAN



drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran 6.

**PENGHARGAAN KABUPATEN PASURUAN
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2019**

No	Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Dokumentasi
1.	Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Hutan Kalirej Kabupaten Pasuruan dengan peringkat "RBRA Tahun 2019"	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	
2.	Public Services of The Year Jawa Timur 2019 "Sakera Jempol" dalam Indonesia Marketers Festival Tahun 2019	Markplus Inc.	
3.	Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 dengan kategori Pratama	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	
4.	Peserta United Nations Public Service Awards 2019 dengan inovasi pelayanan publik "Sakera Jempol"	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
5.	Kepala Daerah Inovatif Kategori Pelayanan Masyarakat Inovasi "SAKERA JEMPOL"	Koran SINDO dan SINDONEWS	

CATATAN *):

